

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan suatu perusahaan atau badan usaha sangat bergantung pada profesionalitas manajemen dalam rangka untuk memajukan dan meningkatkan sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan. Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan laporan-laporan perusahaan khususnya laporan keuangan apabila dengan informasi tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang, sehingga di sinilah laporan keuangan tersebut sangat diperlukan.

Di Indonesia beberapa perusahaan menyatakan ada beberapa kelemahan dalam sistem keuangan negara Indonesia di era orde baru yaitu:

1. Kelemahan dalam desain dan pelaksanaan sistem pengendalian intern;
2. Ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Penyimpanan keuangan negara yang semrawut;
4. Tidak adanya informasi tentang aset dan hutang Negara;
5. Pengungkapan laporan keuangan pemerintah yang tidak konsisten dan tidak memadai.

Dari kelemahan di atas dapat disimpulkan betapa pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern dan kualitas laporan keuangan dalam suatu perusahaan untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan. Laporan keuangan mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan dapat dijadikan tolak ukur bagi pengguna untuk menilai suatu perusahaan agar bisa menginformasikan keuangan dengan pihak dalam maupun pihak luar yang terkait, menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Informasi laporan keuangan merupakan unsur penting bagi investor, kreditor dan pelaku bisnis lainnya. Informasi yang dihasilkan laporan keuangan akan sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan apabila informasi tersebut relevan dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu.

Governmental Accounting Standards Board (GASB, 2009) dalam *Concepts Statement No.1* menyatakan tentang tujuan laporan keuangan yaitu merupakan dasar pelaporan informasi keuangan di pemerintahan yang akan dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Kualitas merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan menurut PP. No. 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan.

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan sebuah perusahaan tergantung dari seberapa besar informasi yang disajikan perusahaan bisa berguna bagi pengguna dan bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi dan persyaratan hutang. Keputusan kontrak yang berdasar kualitas laporan keuangan yang rendah akan mempengaruhi transfer kesejahteraan yang tidak diinginkan.

Dari perspektif investasi kualitas laporan keuangan yang rendah akan menyebabkan tidak efektifnya alokasi sumber daya. Kualitas laporan keuangan yang rendah menyebabkan *ineffisiensi* karena mengurangi pertumbuhan ekonomi yang disebabkan alokasi modal yang tidak tepat. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Emilda, 2014).

Kriteria tersebut di atas merujuk pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ronan Murphy (dalam Payanta, 2006:83) bahwa kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut.

Kualitas laporan keuangan terbaik dapat dilihat dari pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di mana hal itu terungkap saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempresentasikan hasil pemeriksaan (audit) 2014 terhadap beberapa BUMN di Kantor Arsip BPK. Pemeriksaan tersebut atas enam laporan keuangan (LK) Badan Lainnya tahun 2014. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan LK Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Penyelenggara Ibadah Haji (PIH), Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Perkembangan opini atas LK Badan Lainnya Tahun 2010-2014 disajikan dalam Tabel 3.2 di bawah.

Tabel 1.1**Opini Laporan Keuangan Lainnya 2010-2-14**

No.	Entitas	Opini				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Bank Indonesia	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP DPP
2	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	TMP	WTP DPP
3	Otoritas Jasa Keuangan	-	-	-	WTP DPP	WTP DPP
4	Penyelenggara Ibadah Haji	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	Badan Pengelola Dana Abadi Umat	-	WDP	WDP	WDP	WDP
6	SKK Migas (BP Migas)	-	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari enam laporan keuangan, BPK memberikan satu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada SKK Migas (BP Migas), tiga opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan, kemudian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuangan Penyelenggara Ibadah Haji, serta Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Dari keenam BUMN tersebut tiga diantaranya yaitu Penyelenggara Ibadah Haji (PIH), Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) walaupun telah mendapatkan opini WTP DPP tapi masih perlu menindaklanjuti rekomendasi dan catatan- catatan hasil pemeriksaan BPK, agar kualitas laporan keuangannya bisa lebih baik lagi selanjutnya. Begitupun dengan ke tiga BUMN lainnya yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kualitas laporan keuangan yang kurang

baik sehingga harus ditingkatkan lagi kualitas laporan keuangan BUMN tersebut. (IHPS:2015).

Selain itu kasus lain pada tahun 2015 di BUMN, di mana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan adanya temuan-temuan bermasalah dari empat belas perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari tiga puluh lima perusahaan yang diusulkan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Hal ini sangat disayangkan kualitas laporan keuangan pada BUMN masih banyak yang bermasalah, atau disebut memiliki rapor merah dan belum menyelesaikan temuan dan laporan yang signifikan.

BPK juga memeriksa LK BUMN lainnya. BPK memberikan opini WTP terhadap LK PT Peln (Persero) Tahun 2008, opini WDP terhadap LK PT Taspen (Persero) Tahun 2009, dan opini TMP terhadap LK PT Dirgantara Indonesia (Persero) 2009 karena kelemahan sistem pengendalian intern dan laporan keuangan.

Dikutip dari market.bisnis.com, Fenomena lain yang berkaitan dengan keterlambatan penyerahan laporan keuangan yaitu, yang terjadi pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) belum juga menyampaikan laporan keuangannya. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk belum juga merilis laporan keuangan audit per 31 Desember 2012 yang seharusnya telah disampaikan paling telat 1 April 2013. Jika emitmen seperti PT Telkom Tbk wajar jika telat duallisting. Sehingga, laporan keuangan harus disiapkan dua versi. Bursa efek Indonesia (BEI) telah menjatuhkan peringatan tertulis I kepada 52

emitmen yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir 31 Desember 2012. Bursa menyatakan batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2012 adalah apada 1 April 2013. Namun berdasarkan catatan bursa hingga 1 April 2013, terdapat 52 emitmen yang terlambat menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2013 ditemukan 21 objek pemeriksaan terkait BUMN. Hasil telaah BAKN terhadap hasil pemeriksaan BPK terkait BUMN itu ditemukan 510 kasus penyimpangan keuangan negara. Sebanyak 234 kasus diantaranya terkait kelemahan SPI dan sebanyak 276 kasus terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total 510 kasus, sebanyak 93 kasus merupakan kasus kasus yang mengakibatkan kerugian, ungkap Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso. Jumlah potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan di BUMN itu mencapai Rp 2,60 triliun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sering menemukan kecurangan yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal perhitungan akuntansi. Perusahaan milik pemerintah diduga membuat laporan seolah-olah laba yang diterima lebih besar dari laba yang sebenarnya. Menurut Wakil Ketua BPK Hasan Basri, mereka masih banyak menemukan BUMN melakukan rekayasa akuntansi, agar labanya terlihat lebih besar sehingga mendapatkan *reward* atau bonus. Soal mereka bayar pajaknya akan lebih besar itu tidak masalah.

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa masih banyak laporan keuangan yang tidak berkualitas, dan laporan keuangan yang rendah

menyebabkan tidak efektifnya sumber daya, dengan tidak menerapkan sistem pengendalian intern yang benar dan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu sistem pengendalian intern. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hayyuning Tyas Rosdiani (2011) Bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Hal itu karena dengan pengendalian intern dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi dan akan menghasilkan laporan yang benar, dan membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan. Bodnar dan William S., (1995:215) yang menyatakan bahwa meskipun auditor internal dan pihak lainnya memperhatikan struktur pengendalian intern organisasi, tanggung jawab utama terhadap struktur pengendalian intern tetaplah pada manajemen.

Tanggung jawab di atas dapat diwujudkan dengan meningkatkan kemampuan manajemen dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Semakin mampu manajemen mengoperasikan fungsi-fungsinya, maka semakin efektif pengendalian intern dan semakin berkualitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan/organisasi.

Akibat yang ditimbulkan oleh tidak efektifnya pengendalian intern, membutuhkan peran pimpinan instansi pemerintah dan auditor internal untuk menjaga efektifitas pengendalian intern sebagai ikhtiar dalam meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dan mencegah tindak KKN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 PP No. 60 Tahun 2008 diamanahkan agar pimpinan instansi pemerintah menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang

menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nyoman Ari Udiyanti, dkk (2014) mengenai pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain yang menguji hubungan pengendalian intern dan kualitas informasi laporan keuangan dilakukan oleh Gafarov (2009), Ferdy van Beest, et, al., (2009). Penelitian lain yang dapat disimpulkan penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang dilakukan oleh Dewi Andini (2015). Penelitian lain yang menguji efektifitas pengendalian intern penjualan studi kasus pada PT Anta Express Tours & Travel Service, Tbk oleh H. Moermahdi Soerja Djanegara, Maicella Chandra Haryadi (2007). Penelitian lain yang menguji Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan oleh Purwaniati Nugraheni, Imam Subaweh (2008) bahwa penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal, pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana akan berpengaruh meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0.385 satuan, 0.252 satuan, dan 0.399 satuan secara berturut-turut. Dari pernyataan penelitian sebelumnya dengan penelitian saya terdapat perbedaan lokasi penelitian, dan perbedaan variabel X (sistem pengendalian intern) adapun persamaan variabel X, dan ada perbedaan dengan penelitian terdahulu variabel Y (kualitas laporan keuangan) dan ada beberapa persamaan penelitian variabel Y.

Berdasarkan uraian di atas serta dari penelitian sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Masih banyak yang tidak memahami penerapan sistem pengendalian intern.
2. Tidak efektifnya alokasi sumber daya menyebabkan sistem pengendalian intern dan laporan kualitas keuangan yang rendah.
3. Masih banyak yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan sehingga banyak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengendalian intern pada PT Dirgantara Indonesia.
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada PT Dirgantara Indonesia.
3. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Dirgantara Indonesia.

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui sistem pengendalian intern pada PT Dirgantara Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kualitas laporan keuangan pada PT Dirgantara Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Dirgantara Indonesia.

1.4 Kegunaan penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris atas pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, dapat juga dipergunakan sebagai bahan pertimbangan antara teori dan praktik yang sebenarnya di dalam perusahaan yang selanjutnya dijadikan referensi penelitian lebih lanjut. Penulis juga mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Setelah dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa menjawab masalah-masalah yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya. Selain itu juga diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah pemahaman ilmu dan wawasan mengenai kualitas laporan keuangan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menambah referensi untuk penelitian sehingga memotivasi untuk melakukan penelitian selanjutnya dan meningkatkan kualitas mahasiswa dalam memahami kualitas laporan keuangan.

3. Bagi instansi pemerintahan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pelengkap dan masukan serta pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan, khususnya mengenai sistem pengendalian intern, dan kualitas laporan keuangan.

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di PT Dirgantara Indonesia yang berlokasi di Jl. Pajajaran 154 Bandung. Penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.